Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

ANALISIS KESENJANGAN ANTARA KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH

Endah Widyati[1], Iif Pratiwi[2], Hasmitawati[3], Hendri Budiman[4], Desinta Rasyani[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Merangin
[1]kotajambi121212@gmail.com , [2]iifpratiwi1987@gmail.com,
[3]hasmitawati@gmail.com, [4]hendribudiman656@gmail.com,
[5]desintarasyanirasyid@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the gap between national education policies and their implementation at the school level. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through document analysis of policy documents and relevant scholarly articles, and analyzed using content analysis through data reduction, coding and categorization, comparative analysis between policy provisions (das sollen) and school practices (das sein), and synthesis. The findings indicate that implementation gaps manifest in four major forms: standards–practice gaps, procedures–implementation gaps, targets–outcomes gaps, and resources–needs gaps. The most prominent gap relates to unequal implementation capacity, particularly disparities in resources, infrastructure, teacher distribution, and technology access across regions and schools. In addition, policy complexity that is not consistently matched by adequate assistance and the lack of full alignment between central and local governance contribute to widening implementation gaps. The study recommends differentiated support for low-capacity schools/regions, strengthening continuous teacher professional development, building an equitable digital ecosystem, and improving data-driven coordination and oversight to enhance policy effectiveness and learning quality.

Keywords: *National Education Policy, Policy Implementation, Policy–Practice Gap, Schools, Library Research.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya di sekolah. Studi ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, koding dan kategorisasi, analisis komparatif antara ketentuan kebijakan (*das sollen*) dan praktik di sekolah (*das sein*), serta sintesis temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi muncul dalam empat bentuk utama, yaitu kesenjangan standar dan praktik, prosedur dan pelaksanaan, target dan capaian, dan sumber daya dan kebutuhan. Kesenjangan paling dominan

terkait keterbatasan kapasitas implementasi, terutama ketimpangan sumber daya, infrastruktur, distribusi guru, serta akses teknologi yang tidak merata antarwilayah dan antarsekolah. Selain itu, kompleksitas kebijakan yang tidak selalu diimbangi pendampingan serta tata kelola pusat dan daerah yang belum sepenuhnya harmonis turut memperlebar gap implementasi. Penelitian ini merekomendasikan dukungan diferensial bagi sekolah berkapasitas rendah, penguatan pengembangan profesional guru berkelanjutan, pembangunan ekosistem digital yang merata, serta penyederhanaan koordinasi dan pengawasan berbasis data agar kebijakan lebih efektif dan berdampak pada mutu pembelajaran.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Nasional, Implementasi Kebijakan, Kesenjangan Kebijakan–Praktik, Sekolah, Studi Kepustakaan.

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, serta mendorong mobilitas sosial (Yanti et al., 2024). Dalam konteks tersebut, pemerintah menyusun berbagai kebijakan pendidikan nasional sebagai instrumen untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai tujuan nasional, termasuk pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola, serta akuntabilitas layanan pendidikan (Dahyanti et al., 2025). Kebijakan-kebijakan tersebut umumnya dirumuskan dalam bentuk regulasi, standar, dan program yang diharapkan dapat diterjemahkan secara efektif pada level satuan pendidikan (I. Setiawan dan Fauzi, 2023).

Namun, pada praktiknya, kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di sekolah tidak selalu berjalan linier. Sekolah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan berhadapan dengan berbagai kondisi faktual yang beragam, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas manajerial, kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, dukungan masyarakat, serta dinamika sosial-budaya setempat (Thalib dan Haris, 2023). Perbedaan konteks dan kemampuan sekolah tersebut sering menimbulkan jarak antara “apa yang seharusnya” dilakukan sesuai kebijakan dan “apa yang benar-benar terjadi” dalam praktik. Kondisi ini dikenal sebagai

kesenjangan kebijakan–implementasi (*policy–practice gap*), yaitu ketidaksesuaian antara tujuan, prosedur, dan standar kebijakan dengan proses maupun hasil pelaksanaan di lapangan.

Kesenjangan ini penting untuk dicermati karena implementasi kebijakan yang tidak optimal dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan, inefisiensi penggunaan anggaran, meningkatnya beban administratif sekolah, serta melemahnya mutu layanan pendidikan (Qomariyah dan Arifin, 2025). Selain itu, kesenjangan implementasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar sekolah, terutama ketika satuan pendidikan dengan sumber daya memadai dapat menyesuaikan diri lebih cepat, sementara sekolah dengan keterbatasan mengalami hambatan berulang (Suyana et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap bentuk-bentuk kesenjangan dan faktor penyebabnya menjadi krusial untuk menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sekolah (Mayangsari et al., 2003).

Sejumlah kajian implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa kendala sering muncul pada tahap operasional, misalnya penafsiran kebijakan yang berbeda di tingkat pelaksana (Mikael et al., 2025), ketidaksiapan perangkat pendukung, kurangnya pelatihan dan pendampingan, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta mekanisme evaluasi yang lebih menekankan kepatuhan administratif dibanding peningkatan mutu pembelajaran (F. Setiawan et al., 2021). Di sisi lain, perubahan kebijakan yang relatif cepat juga dapat menimbulkan “kejenuhan kebijakan” (policy fatigue) di sekolah, ketika guru dan manajemen sekolah harus beradaptasi terus-menerus tanpa dukungan memadai. Situasi tersebut dapat menggeser fokus sekolah dari peningkatan kualitas pembelajaran menuju pemenuhan administrasi semata, sehingga tujuan inti kebijakan tidak sepenuhnya tercapai (Mikael et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang perlu dilakukan analisis yang menelaah secara sistematis bagaimana kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya terjadi serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan library

research untuk mengkaji dokumen kebijakan dan temuan-temuan empiris dalam literatur ilmiah mengenai implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh, mengompilasi berbagai temuan yang tersebar, serta memetakan pola kesenjangan secara lebih komprehensif berdasarkan sumber-sumber kredibel.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya di sekolah serta menganalisis faktor penyebab kesenjangan, baik dari aspek desain kebijakan maupun kondisi pelaksana di tingkat sekolah. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan kajian implementasi kebijakan pendidikan serta kontribusi praktis bagi pemangku kebijakan, dinas pendidikan, dan pihak sekolah dalam menyusun strategi implementasi yang lebih tepat sasaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Desain ini digunakan untuk menganalisis isi kebijakan pendidikan nasional serta membandingkannya dengan temuan-temuan implementasi kebijakan di sekolah yang terdokumentasi dalam literatur ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mencatat bagian penting dari dokumen kebijakan dan literatur. Informasi inti kemudian dirangkum dalam lembar ekstraksi data yang memuat identitas sumber, jenis kebijakan, konteks sekolah, temuan implementasi, kendala, dan rekomendasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara bertahap. Tahap awal adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi-informasi yang paling relevan dari dokumen kebijakan maupun literatur terkait praktik implementasi di sekolah. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya adalah koding dan kategorisasi, yakni memberi kode pada bagian-bagian penting dalam teks lalu mengelompokkannya ke

dalam tema-tema utama, seperti tujuan kebijakan, aktor pelaksana, ketersediaan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, sistem pengawasan, serta pengaruh konteks sekolah.

Selanjutnya dilakukan analisis komparatif dengan cara membandingkan ketentuan kebijakan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan di sekolah (*das sein*). Proses perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik ketidaksesuaian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang direncanakan dalam kebijakan dan apa yang terjadi di lapangan. Tahap akhir adalah sintesis, yaitu menyusun dan merangkum hasil temuan menjadi pola-pola kesenjangan, menguraikan faktor-faktor penyebabnya, serta menarik implikasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan.

Dalam mengidentifikasi kesenjangan, penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama, yaitu kesenjangan standar–praktik, prosedur–pelaksanaan, target–capaian, serta sumber daya–kebutuhan. Indikator-indikator tersebut membantu menunjukkan aspek kebijakan mana yang paling sering tidak selaras ketika diterapkan di sekolah, baik dari sisi aturan dan standar yang ditetapkan, proses pelaksanaan, hasil yang dicapai, maupun dukungan sumber daya yang tersedia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil

1. Variasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Antarprogram dan Antarsekolah

Hasil kajian menunjukkan efektivitas kebijakan pendidikan tidak seragam antarprogram dan antarsekolah. Kurikulum Merdeka dipandang sebagai kebijakan inovatif yang memberi keleluasaan sekolah mengembangkan pembelajaran sesuai konteks, namun capaian implementasinya belum merata. Dalam salah satu temuan, hanya sekitar 54% sekolah yang mampu mengimplementasikan kurikulum ini secara penuh; sisanya masih terkendala keterbatasan guru maupun sarana pendukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa desain kebijakan yang progresif belum otomatis menjadi praktik operasional yang konsisten di semua sekolah. (Fadilah et al., 2025).

2. Kesenjangan Pemerataan Akses

Pada tingkat makro, kebijakan wajib belajar 12 tahun dinilai mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK hingga 91,23% pada 2024. Namun, di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), APK masih dilaporkan berada di bawah 75%. Artinya, target peningkatan partisipasi relatif tercapai secara nasional, tetapi belum terwujud secara berkeadilan antardaerah. Temuan lain juga menegaskan adanya disparitas akses antara wilayah pedesaan dan perkotaan, yang memperlihatkan perlunya kebijakan lebih tepat sasaran agar keadilan dan kualitas pendidikan dapat terwujud (Fadilah et al., 2025).

3. Kesenjangan Kualitas dan Kapasitas Guru

Program sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) memperkuat pengakuan kompetensi secara formal dan administratif. Namun, sebagian kajian menyatakan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas belum signifikan, sehingga kebijakan peningkatan profesionalisme guru dinilai efektif pada aspek administratif tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembelajaran. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan kebijakan (perubahan kualitas proses belajar) dan hasil yang dialami siswa di ruang kelas (F. Setiawan et al., 2021).

4. Kesenjangan Digitalisasi Pendidikan Kesiapan Di Banyak Sekolah

Pada aspek digitalisasi pendidikan, kebijakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mendorong penggunaan platform digital/LMS di sejumlah sekolah, terutama di wilayah perkotaan. Namun, efektivitasnya terbatas karena tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai. Salah satu temuan menyebut sekitar 35% sekolah di daerah pedesaan belum memiliki akses internet yang stabil. Kajian lain menyebut digital divide masih menjadi persoalan serius karena sebagian sekolah di daerah tertinggal belum memiliki akses internet memadai, sehingga kebijakan digitalisasi kurang efektif menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan digital tidak cukup mengandalkan inisiatif penggunaan aplikasi, tetapi

membutuhkan prasyarat dasar (akses internet, perangkat, dan literasi digital) (Mikael et al., 2025).

5. Kesenjangan Sumber Daya Pendidikan

Keterbatasan sumber daya muncul dalam bentuk distribusi anggaran yang tidak merata, kekurangan guru (khususnya di daerah 3T), serta ketimpangan fasilitas antara perkotaan dan pedesaan. Meski anggaran pendidikan nasional dialokasikan sebesar 20% dari APBN, temuan menyebut distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat lokal sering tidak merata. Kondisi ini berdampak pada kemampuan sekolah memenuhi standar layanan, termasuk sarana belajar, perangkat TIK, dan dukungan pembelajaran lainnya (Dahyanti et al., 2025).

6. Kesenjangan Implementasi Pendidikan Menengah dan Kejuruan

Kajian tentang pendidikan menengah dan kejuruan menegaskan adanya tantangan implementasi kebijakan berupa kurangnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya dukungan keuangan, serta ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, implementasi Kurikulum 2013 pada pendidikan menengah/kejuruan juga dilaporkan menghadapi kendala serupa: minim pelatihan bagi guru/pengelola pendidikan, kurangnya sumber daya dan dukungan pemerintah, serta mismatch kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Temuan ini memperlihatkan gap yang kuat pada indikator sumber daya–kebutuhan dan standar–praktik, terutama untuk menyiapkan lulusan yang relevan dengan dunia kerja (I. Setiawan dan Fauzi, 2023).

7. Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaan Standar Mutu

Studi kasus implementasi standar mutu di sekolah menengah menunjukkan pemahaman terhadap standar mutu nasional cenderung lebih baik dibanding standar mutu internasional. Warga sekolah mengakui standar nasional wajib dipenuhi, sedangkan standar internasional masih dipandang sebagai target yang belum sepenuhnya dipahami dan baru diadaptasi secara bertahap. Keterbatasan utama yang dicatat mencakup kurangnya pelatihan guru,

infrastruktur digital belum lengkap, koneksi internet yang kadang lambat, serta dana penguatan/upgrade yang terbatas. Di sisi lain, sekolah mulai melakukan strategi perbaikan melalui pemanfaatan platform digital untuk monitoring mutu, benchmarking, serta rencana kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pendampingan mutu dan riset (Qomariyah dan Arifin, 2025).

8. Kesenjangan Tata Kelola

Temuan kajian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, struktur birokrasi, serta partisipasi masyarakat. Hambatan yang sering muncul mencakup birokrasi yang berbelit dan ketidaksinkronan kebijakan pusat–daerah (disharmoni regulasi antarlevel pemerintahan), yang dapat menurunkan konsistensi pelaksanaan program di sekolah. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan bukan hanya persoalan teknis di sekolah, tetapi juga persoalan koordinasi dan tata kelola kebijakan (Fadilah et al., 2025).

B. Pembahasan

Pembahasan berikut menautkan temuan hasil dengan kerangka indikator kesenjangan untuk menjelaskan pola gap yang berulang serta faktor penyebab utamanya.

1. Kesenjangan Standar–Praktik

Banyak kebijakan pendidikan nasional menetapkan standar dan orientasi (misalnya fleksibilitas pembelajaran, peningkatan mutu, digitalisasi, serta penguatan vokasi). Namun, hasil kajian menunjukkan sekolah sering berada pada posisi "mengejar standar" tanpa dukungan kapasitas yang setara. Ketika standar menuntut inovasi, sekolah dengan SDM terbatas, literasi digital rendah, atau sarana minim cenderung menjalankan program secara parsial. Contoh yang menonjol terlihat pada implementasi Kurikulum Merdeka yang belum merata, serta upaya penerapan standar mutu (terutama standar internasional) yang berjalan bertahap karena keterbatasan pendanaan dan SDM. Pola ini menandakan gap standar–praktik terutama terjadi pada sekolah yang paling lemah kapasitasnya (Qomariyah dan Arifin, 2025).

2. Kesenjangan Prosedur–Pelaksanaan

Kebijakan publik mensyaratkan sosialisasi, pelaksanaan, dan

pengawasan agar efektif. Ketika prosedur teknis kebijakan tidak disertai pendampingan yang cukup, pelaksana di sekolah (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan) cenderung menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi lokal. Penyesuaian ini penting, tetapi juga memunculkan variasi pelaksanaan antar sekolah/daerah. Selain itu, birokrasi yang berbelit dan disharmoni regulasi pusat–daerah memperpanjang rantai pelaksanaan, sehingga pesan kebijakan bisa berubah (distorsi) ketika sampai ke level sekolah. Akibatnya, beberapa kebijakan tampak "sudah ada di dokumen" tetapi belum menjadi mekanisme kerja rutin di sekolah (Ayu et al., 2024).

3. Kesenjangan Target–Capaian

Peningkatan APK menunjukkan kemajuan akses secara nasional, tetapi kesenjangan capaian di wilayah 3T menandakan target belum tercapai secara berkeadilan. Kesenjangan target–capaian juga muncul pada kebijakan peningkatan profesionalisme guru: sertifikasi/PPG meningkatkan capaian administratif, tetapi belum otomatis menghasilkan perubahan signifikan di praktik pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi kebijakan perlu membedakan keberhasilan pada level agregat (makro) dan keberhasilan pada level layanan nyata di sekolah (mikro), karena kesenjangan sering tersembunyi jika hanya dilihat melalui capaian rata-rata nasional (Fadilah et al., 2025; Arif dan Hidayati, 2024).

4. Kesenjangan Sumber Daya–Kebutuhan

Mayoritas gap yang teridentifikasi berakar pada mismatch antara tuntutan kebijakan dan kapasitas sekolah atua daerah. Kesenjangan infrastruktur (kelas, laboratorium, perangkat TIK, internet), keterbatasan pendanaan dan distribusinya, serta kekurangan guru (terutama di 3T) membuat kebijakan cenderung efektif di wilayah/ sekolah yang sudah kuat dan kurang efektif di wilayah yang lemah. Pada kebijakan digitalisasi, kekurangan akses internet menjadi prasyarat yang paling menentukan; tanpa akses stabil, sekolah tidak dapat menjalankan LMS maupun pembelajaran berbasis teknologi secara konsisten. Pada pendidikan menengah dan kejuruan, kebutuhan sarana praktik dan kemitraan industri menjadi prasyarat

agar kurikulum benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

5. Peran Aktor Pelaksana dan Konteks Sekolah

Dalam kerangka implementasi bottom-up dan konsep birokrasi tingkat jalanan, pelaksana di garis depan (guru, kepala sekolah, pengelola) memiliki diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks sekolah. Diskresi ini dapat memperkuat kebijakan ketika sekolah memiliki kepemimpinan kolaboratif, jejaring eksternal, dan literasi digital yang memadai, misalnya terlihat pada strategi benchmarking, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan pemanfaatan platform digital untuk monitoring mutu. Namun, diskresi juga dapat menjadi hambatan ketika kapasitas rendah dan beban administratif tinggi, sehingga implementasi bergeser dari tujuan substantif (mutu pembelajaran) menjadi sekadar pemenuhan dokumen dan administrasi.

6. Implikasi dan Rekomendasi Perbaikan (Berbasis Temuan)

Pertama, diperlukan strategi dukungan diferensial (affirmative support) bagi daerah 3T dan sekolah berkapasitas rendah, terutama pada pemenuhan guru, sarana, dan infrastruktur digital. Kedua, penguatan kapasitas guru perlu bergerak dari sekadar sertifikasi menuju pengembangan profesional berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan kelas (*coaching*, komunitas belajar, *lesson study*). Ketiga, digitalisasi pendidikan perlu didesain sebagai ekosistem, penyediaan perangkat dan internet harus sejalan dengan peningkatan literasi digital, dukungan teknis, serta model pembelajaran yang sesuai konteks. Keempat, untuk pendidikan menengah dan kejuruan, perlu penguatan kemitraan industri agar kurikulum, praktik kerja, dan sarana praktik benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Kelima, tata kelola pusat dan daerah perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi, disertai pengawasan berbasis data agar implementasi tidak berhenti pada level administrasi (F. Setiawan et al., 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kepustakaan (library research) dan analisis isi terhadap berbagai sumber

dalam kumpulan jurnal, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara kebijakan pendidikan nasional sebagai pedoman normatif (*das sollen*) dan praktik implementasinya di sekolah (*das sein*). Kesenjangan ini muncul karena implementasi kebijakan dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sekolah dan daerah, sehingga penerapan kebijakan tidak berlangsung merata.

Secara umum, kesenjangan paling menonjol terlihat pada empat indikator utama. Pertama, kesenjangan standar–praktik, ketika standar kebijakan menuntut inovasi dan pemenuhan mutu, tetapi banyak sekolah baru mampu melaksanakannya secara parsial. Kedua, kesenjangan prosedur–pelaksanaan, yang terjadi akibat perbedaan pemahaman pelaksana, keterbatasan pendampingan, serta pengawasan yang belum sebanding dengan kompleksitas kebijakan. Ketiga, kesenjangan target–capaian, yaitu keberhasilan indikator makro (misalnya peningkatan partisipasi) belum otomatis diikuti pemerataan dan peningkatan kualitas layanan di semua wilayah. Keempat, kesenjangan sumber daya–kebutuhan, yang menjadi akar dominan, mencakup ketimpangan infrastruktur, distribusi guru, pendanaan, dan akses teknologi, terutama pada sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan.

Implikasinya, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari ketercapaian administrasi atau capaian agregat nasional, tetapi perlu mempertimbangkan kualitas implementasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada dukungan diferensial bagi sekolah/daerah berkapasitas rendah, penguatan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dan ekosistem digital yang merata, serta harmonisasi tata kelola pusat–daerah agar pelaksanaan kebijakan lebih konsisten dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, S., dan Hidayati, D. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, *6*(3), 1–10.

Ayu, R. S., Dewi, A., dan Febrina, N. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal*

ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, *4*(2), 1–14.

Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., dan Darmansah, T. (2025). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *2*.

Fadilah, F. Z., Rizanah, S., Naga, F. Y., Prayogi, G., Azizah, S. N., dan Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, *04*(08), 108–119.

Mayangsari, I., Dewi, F. A., Nurfadila, dan Rivadah, M. (2003). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, *20*, 98–103.

Mikael, S., Sunta, M., Aprilianza, H., Safitri, R. A., dan Yohanes, Y. (2025). Analisis Kesenjangan dan Strategi Solusi Dalam Menghadapi Krisis Pendidikan di Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(2), 416–422.

Qomariyah, dan Arifin, M. (2025). Menganalisis Standar Pendidikan Mutu Nasional dan Internasional: Tantangan, Implementasi, dan Strategi Peningkatan di Era Globalisasi. *AL-MUDABBIR: Journal of Islamic Education Management*, *1*(2), 210–216.

Setiawan, F., Jayanti, G. D., Azhari, R., dan Siregar, N. P. (2021). Analisis Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. *Pendidikan Dasar dan Keguruan*, *6*(1), 40–48.

Setiawan, I., dan Fauzi, A. (2023). Analisis Pendidikan Menengah Dan Kejuruan Dalam Menerapkan Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, *1*, 190–205.

Suyana, N., Dalmeri, Sugiharto, dan Jupriadi. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, *5*(1), 620–634.

Thalib, N., dan Haris, U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, *2*(1), 76–84.

Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., dan Marlina, E. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*, *4*(1), 47–52.